

**Penulis:**

Heber Rona

Afiliasi:

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
Indonesia Timur di Makassar

Email:

heberona494@gmail.com

LOKO KADA TUO: Jurnal
Teologi Kontekstual &
Oikumenis

ISSN: 3047-4213(online)

DOI :

<https://doi.org/10.70418/qq1mb818>

Vol. 02 No. 01, Maret, 2025;
(hlm 55-73)

POLITIK TEOLOGIS: Konsep Pemikiran John Calvin tentang Pemerintahan dan Pelayanan untuk Menilai Masalah Korupsi di Nusa Tenggara Timur

Abstract

This article was written with the aim of reviewing the study of John Calvin's concept of political theology regarding the practical political perception of church officials and specifically state government. This research discussion paper was completed using qualitative research methods by examining the concept of Calvin's thought specifically on government and church services and specifically the state. Therefore, each data is specifically collected by reviewing any literature that is relevant to what is being discussed. This study simply shows that Calvin saw government from two parts, namely the government of the Church (spirituality). Second, from the perspective of the state government (outwardly). From these two views, factors emerge which are influential in carrying out political service practice and in terms of political service practice in state government positions, which then become more of an economic factor which is more politically beneficial for state government officials. This research study and discussion is more specifically aimed at state government officials so that they can reform their understanding of politics correctly and theologically in accordance with what Calvin meant about his political theology in government and ministry.

Keywords: John Calvin's view; Governmental; public service; corruption .

Abstrak

Tulisan Artikel ini ditulis dengan tujuan melihat kembali kajian konsep teologi politik John Calvin terhadap persepsi secara praksis politik jabatan gereja dan secara khusus pemerintah negara. Tulisan pembahasan penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji konsep pemikiran Calvin yang dikhususkan pada bagian pemerintah dan pelayanan gereja dan secara khusus negara. Oleh sebab itu, secara khusus setiap data dikumpulkan dengan cara mengkaji setiap literatur yang sesuai dengan apa yang dibahas. Dalam kajian ini secara sederhana menunjukkan bahwa Calvin melihat

pemerintahan dari dua bagian yakni pemerintahan dari Gereja (spiritualitas). Kedua, dari segi pemerintah negara (lahiriah). Dari dua pandangan ini kemudian muncul faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam menjalankan praksis pelayanan politik dan secara pada bagian pelayanan praksis politik dalam jabatan pemerintahan negara, yang kemudian lebih kepada faktor ekonomi yang lebih menguntungkan pada politis pejabat pemerintahan negara. Kajian penelitian dan pembahasan ini lebih dikhususkan pada pejabat pemerintah negara agar dapat mereformasi kembali pemahaman mereka tentang politik secara benar dan teologis sesuai yang apa yang dimaksudkan Calvin tentang teologi politiknya dalam pemerintah dan pelayanan.

Kata Kunci: John; Calvin; Pemerintahan; Pelayanan; Korupsi

A. Pendahuluan

Dunia secara global dan juga negara-negara yang ada di dalamnya dari zaman ke zaman selalu mengalami banyak masalah dan salah satu masalah bagi negara-negara di dunia adalah korupsi. Akibat dari tindakan korupsi yang sangat merajalela di negara-negara dunia dianggap sangat merugikan sehingga mendorong setiap pemerintahan untuk mencari solusi dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah korupsi.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang dari zaman ke zaman mengalami tantangan yang sama terkait korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman orde lama sampai Orde Baru, hal yang paling mendasar terjadi korupsi di Indonesia diakibatkan oleh adanya monopoli kekuasaan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam jabatan tertentu. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan etis dan hal ini sering terjadi pada orang yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu dipergunakan untuk memperkaya pribadinya.²

Pada masa Orde Baru terdapat kasus dimana presiden Soeharto bersama keluarganya dinyatakan melakukan tindakan korupsi melalui bisnis-bisnis mereka, yang terjadi sejak tahun 1980 sampai 1990. Namun, terhadap Orde Lama, Soeharto, yang pada tahun 1970 membentuk komisi IV yang dipimpin oleh Wilopo, menganalisis masalah tindakan korupsi lewat setiap pemimpin/pejabat dan juga wajib pelaporan aset yang dimiliki oleh setiap pemimpin/pejabat dinyatakan gagal.³

Namun demikian, sejak Orde Lama berakhir dan masuk pada Orde Baru terdapat banyak tindakan korupsi yang semakin merajalela, seperti kasus korupsi pada Pertamina, Bulog, PN Telekomunikasi, jajaran Pers dan Grafika. Hal ini tidak hanya berdampak pada PNS melainkan terjadi sampai pada penggunaan jasa mereka untuk

¹Hikmatu Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Eera Orde Lama Hingga Hera Reformasi," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 1 (2015): 230–38, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12011>.

²HALL, M. Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume_6_Nomor_2_Juli_2009.pdf#page=91.

³Hikmatu Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Eera Orde Lama Hingga Hera Reformasi." 231-132

tersebar pada masyarakat secara umum. Atas dasar ini kemudian diambil tindakan oleh pemerintah lewat pembentukan aturan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi, dan juga Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.⁴ Dalam tulisan Sri Suwitri, sesuai hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa pada tahun 1999 Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International (TI), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat lima (5) dari 144 negara terkorup di dunia, data ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sangat tinggi dan perlu diberi perhatian secara serius.⁵

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru yang kemudian menjadi perhatian pemerintah dengan mengadakan kebijakan lewat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi namun tidak relevan untuk mengatasinya secara penuh dan justru semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Ketika melihat sejarah dan kasus korupsi yang terjadi tiap tahun hingga saat ini maka akan ditemukan masalah korupsi lewat Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi sejak tahun 2003-2022 mencapai 138 triliun. Hal ini yang kemudian, pada saat itu Indonesia yang ada dalam keadaan krisis perekonomian moneter dan berniat untuk memulihkan kembalinya lewat BLBI, justru sebaliknya mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga masalah ekonomi semakin meningkat.⁶

Masalah korupsi yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang masuk dalam daftar korupsi terbesar untuk Indonesia dengan mencapai puluhan triliun.⁷ PT Asabri pun melakukan tindakan korupsi pada pengelolaan dana pensiun bagi para pejabat dan pemerintahan mulai dari TNI, Polisi dan PNS, dari data yang ada PT Asabri melakukan korupsi dengan merugikan negara sebesar 22,78 triliun rupiah.⁸ Kasus korupsi di Indonesia memuncak dan sangat besar dilakukan oleh PT Timah TBK dengan mencapai angka 271 triliun dan masalah korupsi ini diperkirakan terjadi se-

⁴Riza Sirai, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial H(PIS)* 3, no. 1 (2024): 279-91, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33242.

⁵Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi," *DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2007): 23-41, http://eprints.undip.ac.id/4370/1/Artikel_Witri.pdf.

⁶Aang Achmad, "Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat," *OLD Website Of Jurnal Mlimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 431-645, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16179>.

⁷Dilya Qory Nailuvar et al., "Kedudukan Dan Peran KPK Dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Negara Untuk Kelapa Sawit Di Riau Oleh Grup Duta Palma," *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 137-145, <https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/291>.

⁸dan Mashudi Ratna Oktavina Rizky, Reza Abdilah Saputra, Maftukhatul Faziani, "Pencegahan Korupsi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Oligarki Dana Pensiun PT. Asabri (Persero)," *Jurnal Governance And Politics* 4, no. 2 (2024): 60-68, <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/jgp/article/view/426>.

jak tahun 2015-2022 dan terbongkar pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh juru bicara dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yaitu Ketut Sumedana.⁹

Lord Acton, seorang Guru Besar Sejarah Modern di Universitas Cambridge berpendapat bahwa korupsi terjadi disebabkan adanya kekuasaan, Acton mengibaratkannya seperti dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu diiringi oleh perjalanan kekuasaan, lalu pada saat yang sama kekuasaan berubah menjadi sebuah pintu masuk bagi tindakan korupsi.¹⁰ Bagi Iwan Setyawan dalam tulisannya ia juga berpendapat bahwa, korupsi adalah suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kekuasaan seperti pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri.¹¹ Kedua pendapat ini sejalan dengan masalah tindakan korupsi yang diuraikan di atas. Artinya bahwa korupsi merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan mempermiskinkan publik secara umum.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Pertama, Penulis mengumpulkan data dengan melihat konsep atau pandangan tokoh reformator John Calvin tentang pemerintah dan pelayanan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan artikel. Selanjutnya, konsep Calvin tentang pemerintah dan pelayanan dipakai menyoroti kebijakan dan pendekatan politik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, dan secara khusus NTT.

Teologi politik Calvin sangat relevan bagi kehidupan dan politik pemerintahan NTT dan diharapkan dapat menolong pemerintah NTT untuk melihat dan mereformasi kembali pemahaman mereka untuk dapat berpolitik secara teologis.

C. Nusa Tenggara Timur dan Masalah Korupsi

Masalah praktik korupsi ibaratnya suatu “tradisi” yang telah mendarah-daging dalam negara Indonesia. Masalah korupsi bukan saja ada pada level pusat negara, namun hal ini sudah sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan bahkan kelurahan. Dan masalah korupsi pun menyebar pada dunia pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pem-

⁹Insiyira Yusdiawan Azhar Alvina Eka Rahmawati, “Analisis Negotiated Order Theory Dalam Kasus Korupsi 271 Triliun Di PT. Timah TBK Indonesia,” *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 73–84, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/410>.

¹⁰Cahya Adhitya Pratama Herdin Muhtarom and Gery Erlangga, “Akar Budaya Korupsi Indonesia : Historiografi, Penyebab, Dan Pencegahannya,” *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 2, no. 1 (2022): 13–20, <https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/24985>.

¹¹Iwan Setyawan, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kultura* 16, no. 1 (2015): 5210–5366, <https://umnaw.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/SEPTEMBER-2015.pdf#page=4>.

bangunan lainnya.¹² Itu bisa dilihat pada masalah korupsi yang menjadi perbincangan negara yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Selanjutnya disingkat NTT).

Masalah korupsi di NTT, secara khusus Kabupaten Alor, yakni ada tiga (3) orang tersangka yakni EW sebagai PNS pada balai prasarana permukiman wilayah NTT, ADSN sebagai direktur PT Araya Flobamora Perkasa dan AYP sebagai Wiraswasta, ketiganya ditetapkan sebagai oknum yang diduga melakukan korupsi atas pembangunan rehabilitasi 14 Sekolah di Kab. Alor pada tahun 2022 dengan nilai kontrak awal 23 Miliar Rupiah lebih. Pada tanggal 29 Agustus 2024, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penyitaan barang bukti sesuai surat perintah penggeledakan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT secara nomor 54/N.3.5/08/2024. Penggeledakan dari ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2024.¹³

Hal ini dilakukan karena pembangunan sekolah tersebut yang tidak sesuai dengan kesepakatan yakni pembangunan 14 Sekolah tersebut seharusnya selesai pada 16 Oktober 2022 sesuai hasil kesepakatan bersama, sebaliknya tepat pada waktu yang disepakati, pembangunan tersebut belum selesai hingga Desember 2022. Namun ketiga tersangka tersebut dengan tegas mengajukan permohonan peresmian pembangunan dan pembayaran penuh. Surat pengajuan permohonan peresmian yakni ES yang merupakan PPK Pelaksana Tahun Anggaran 2022 secara resmi menyetujui surat permohonan yang diajukan lalu ditandatangani serta melakukan pembayaran secara penuh. Atas dasar ini kemudian ketiga oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah korupsi atas pembangunan yang belum selesai.¹⁴

Polda NTT menetapkan lima (5) orang tersangka dalam kasus tindakan korupsi terhadap pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking di Desa Meusin, Kecamatan Boking, atas dasar ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,5 Miliar Rupiah. Dan yang melakukan tindakan korupsi ini merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan yakni, YB sebagai pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), GA sebagai Konsultan Perencana, MZ sebagai Direktur PT. TJBA, AFL sebagai Peminjam Bendera dan Kontraktor pembangun proyek, dan HD sebagai Konsultan Pengawas. Proyek pembangunan RSP Boking dikerjakan oleh PT

¹²Sanusi, "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." 90

¹³KEJATINTT NEWS, "Pidsus Kejati NTT Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Rehabilitasi Sekolah Pasca Bencana Kabupaten Alor Tahun 2022," accessed January 16, 2025, <https://kejatintt.kejaksaan.go.id/kejatintt-news/pidsus-kejati-ntt-tetapkan-3-tersangka-kasus-korupsi-rehabilitasi-sekolah-pasca-bencana-kabupaten-alor-tahun-2022/>.

¹⁴Palce Amalo, "Kejati NTT Tahan 3 Tersangka Korupsi Renovasi 14 Sekolah Di Alor," accessed January 16, 2025, <https://mediaindonesia.com/nusantara/686558/kejati-ntt-tahan-3-tersangka-korupsi-renovasi-14-sekolah-di-alor>.

Tangga Batu Jaya Abadi pada 2017. Proyek menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dengan dana sebesar 17,4 Miliar.¹⁵

Tepat pada tanggal 11 Oktober 2022, pihak Kejaksaan Negeri Manggarai secara langsung mengamankan dokumen di kantor Dinas Perhubungan Manggarai Timur dalam masalah korupsi atas pembangunan terminal dan dermaga yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, hal ini kemudian dinyatakan bahwa atas tindakan tersebut negara kemudian mengalami kerugian sebesar 5,3 Miliar Rupiah, masalah tindakan korupsi ini pun dilakukan oleh GN, Kepala Dinas Perhubungan, RK, Kabid Perhubungan Darat, NT, Sekretaris DPRD, KAD Kepala Unit Layan dan dua (2) orang kontraktor sebagai pelaksana pekerja lanjutan.¹⁶ Pembangunan terminal dengan menggunakan dana tahun anggaran 2012 dan 2013 dinyatakan sia-sia karena terminal dan dermaga yang dibangun tidak bisa digunakan sama sekali oleh masyarakat.¹⁷

Dari beberapa uraian contoh masalah korupsi di NTT, semua itu dilakukan atas kepentingan diri sendiri dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Omnesimus Kambodji bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau jabatan atau wewenang tertentu yang kemudian atas dasar ini ia dengan sengaja melakukan korupsi demi kepentingan sendiri dan kelompok tertentu. Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya demi kepentingan pribadi.¹⁸ Sampai kepada pendapat terakhir ini, Penulis mengajukan pertanyaan analitis: mungkinkah tindakan korupsi terjadi karena didorong oleh sifat dan keinginan jahat atau rakus dalam diri seseorang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian ia menggunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan korupsi demi memperkaya diri sendiri dan memiskinkan publik secara umum? Pertanyaan itu terkait pertanyaan lain yang Penulis ajukan di awal, yaitu apakah NTT benar-benar miskin atau dimiskinkan oleh kecenderungan jahat seseorang atau sekelompok orang yang memanipulasi kekuasaan?

Melihat masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan NTT sesuai apa yang sudah penulis uraikan di atas, Penulis kemudian menggunakan pemikiran Johannes

¹⁵Nusra Detikbali, "Korupsi Proyek RS Boking RP 16,5 Miliar: 5 Tersangka-Bupati TTS Di Periksa," 19 Januari 2025, Pukul 07:30 Wita, n.d., <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6821995/korupsi-proyek-rs-boking-rp-16-5-miliar-5-tersangka-bupati-tts-diperiksa>.

¹⁶INDOTIMOST.COM, "Diduga Kerugian Negara Mencapai 5,3 M, Ketua DPP GPM Mendesak KPK RI Segera Memeriksa Bupati Manggarai Timur," accessed January 22, 2025, <https://indotimpost.com/diduga-kerugian-negara-mencapai-53-m-ketua-dpp-gpm-mendesak-kpk-ri-segera-memeriksa-bupati-manggarai-timur/>.

¹⁷Gordy Donovan, "Dugaan Korupsi Terminal Kembur Matim Jaksa Bilang Tidak Tutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunflores.Com Dengan Judul Dugaan Korupsi Terminal Kembur Matim Jaksa Bilang Tidak Tutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain, <https://fl>," accessed January 23, 2025, https://flores.tribunnews.com/2022/10/29/dugaan-korupsi-terminal-kembur-matim-jaksa-bilang-tidak-tutup-kemungkinan-ada-tersangka-lain#google_vignette.

¹⁸Omnesimus Kambodji, *Korupsi Perspektif Teologi Etis* (Yogyakarta: ANDI: Penerbit Buku dan Majalah Rohani, 2022).

Calvin tentang pemerintahan dan pelayanan sebagai perspektif analitis dalam melihat masalah korupsi di NTT.

D. Johannes Calvin dan Kepedulian Politis-teologisnya

Johannes Calvin adalah seorang tokoh terkenal yang lahir pada tanggal 10 Juli 1509 atau sebagai Jean Calvin di Kota Noyon, Prancis Utara.¹⁹ Kota yang Calvin lahir dan tinggal di sebuah kota Katetdral lama yang pada saat itu Uskup yang menjadi pemimpin atau menguasai kota tersebut, Uskup pun merupakan salah satu dari *Twelve Peers of France* (Dua Belas Bangsawan Tertinggi Prancis). Pada tahun 1525, setelah Calvin lahir, takhta kota kelahiran Calvin pada saat itu diduduki oleh Charles de Hangest yang merupakan keluarga bangsawan kota tersebut. Calvin memiliki empat orang bersaudara. Ayahnya, Gerard merupakan seorang asisten administrasi yang ada ditempat mereka berada, sedangkan ibu kandungnya, Jeanne le Franc, meninggal pada saat Calvin masih berusia lima tahun. Sejak kecil Calvin sudah dikenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan yang baik.²⁰

Pada masa kecil Calvin ia sering ada dan hidup bersama di sekeliling keluarga-keluarga ini, lebih khusus dengan keluarga Montmor. Calvin pun bersama tiga orang muda dari keluarga Hangest berangkat ke Paris dan kuliah. Ketiga orang muda itu adalah Claude, adalah seorang kepala biara St. Eloi yang mendedikasikan salah satu tafsiran mengenai *De Clementia* karya Seneca pada tahun 1532.²¹ Pertemanan ini kemudian mempengaruhi dalam membentuk Calvin. Calvin muda dibentuk menjadi pribadi yang baik karena adanya pengaruh pengertian yang baik dan kuat sama seperti teman-teman lain yang berasal dari Picard tempat mereka tinggal. Ini kemudian membuat Calvin merasa berutang pada keluar Montmor yang telah membentuknya lewat sikap tata krama aristokratisme.²²

Semasa kuliahnya di Paris, Calvin menekuni retorika, logika, serta seni-seni topik pada umumnya dan juga pendidikan klasik. Pemikiran Calvin pertama kali dipengaruhi oleh John Major, yang merupakan seorang Katolik Roma yang sangat terkemuka lewat intelektualnya yang sangat tinggi serta Peter yang merupakan orang Spanyol.²³ Asumsi-asumsi teologis Calvin pada masa pendidikannya, secara umum mencakup atau sejalan dengan Agustinus tentang natur manusia, yakni suatu pandangan negatif pada manusia mengenai perbuatan dosa asal, serta sikap tidak

¹⁹Cristian de Jonge, *Apa Itu Calvinisme?*, ed. Rika Uli Napitupulu (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020).

²⁰David W. Hall, , *Calvin Di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil*, ed. Stevy Tilaar (Surabaya: Momentum, 2011).

²¹Francois Wendel, *Calvin: Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya*, ed. Irwan Tjuliarto (Surabaya: Penerbit Momentum, 2015) 4.

²²Wendel. 5

²³Hall, *Calvin di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil*. 55-56

menerima akan keselamatan yang akan diperoleh manusia lewat perbuatan baik yang dilakukan.²⁴

Pelajaran yang Calvin peroleh pada masa kuliah tak terlepas dari tiga bahasa klasik yakni, bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Sebagai pengaruh pemikiran dan pembelajaran yang ketat pada zaman itu, Calvin pun berhasil dipengaruhi oleh Erasmus, Le Fevre, Wolmar, dan Francois Rabelais, lewat pemikiran mereka. Mereka adalah orang-orang berpengaruh dalam dunia pendidikan pada zaman itu. Calvin kemudian berhasil menyelesaikan studi masternya yang dianggap lebih tinggi dari Cambridge/Oxford.²⁵

Pendidikan yang diperoleh Calvin adalah sesuatu yang sangat baru. Ia lebih berfokus dan lebih menghargai konsep dari karya-karya klasik pada masa lalu, di samping tradisi-tradisi dari Katolikisme Roma. Ia dikenal sebagai sosok yang memahaminya dengan baik dan kritis pada sesuatu yang membawa dampak kebenaran yang riil. Hal ini bisa dilihat dari karyanya lewat tafsiran *Seneca De Clementia* pada tahun 1532, yang di dalamnya menekankan bahwa pangeran bukan sesuatu yang lebih tinggi di atas hukum, sebaliknya hukum memiliki posisi yang lebih tinggi dari pangeran. Karya-karya Calvin merupakan terbitan yang lebih berfokus pada gagasan teologis yang sangat luas.²⁶

Keinginan ayah Calvin pun sangat besar kepada dirinya. Ini dilihat dari peran ayahnya yang sangat besar pada pendidikan Calvin di Paris. Ayahnya mendorongnya untuk belajar lebih lanjut pada ilmu hukum yang dianggap sebagai jalan alternatif yang baik untuk mencapai kekayaan yang baik dibanding profesi imam. Pada tahun 1528-1533, tepatnya di Bourges dan Orleans Calvin mulai menekuni dengan belajar pada ilmu hukum. Motivasi yang dianggap sebagai usaha yang gemilang pada masa yang akan datang dan didasarkan pada gagasan ilmu politik. Akhirnya ia mendapat izin praktik hukum. Hasil dari usaha ini kemudian mengantarnya memimpin republik Jenewa.²⁷

Calvin memulai perubahan pandangannya diperkirakan pada saat ia melanjutkan studinya di University of Bourges pada tahun 1529. Ia menyusun komentari terhadap bagian pengantar Mazmur, "Lewat pertobatan yang secara tiba-tiba, Tuhan telah membuat saya takluk lewat pikiran saya untuk mudah diajar/dididik. Ketika mulai memahami dan menikmati kesalehan sejati, saya mulai dibakar dengan semangat dalam belajar dan belajar untuk mengejar Dia."²⁸ Calvin kemudian memulai karirnya

²⁴Hall, 56

²⁵David W. Hall, *Warisan John Calvin: Pengaruhnya Di Dunia Modern*, ed. Jessy Siswanto & IrwanTjulianto (Surabaya: Momentum, 2017).

²⁶Hall, 45

²⁷Hall, 46

²⁸Jeconiah Lunardi, "Metafora Gereja Sebagai Mempelai Wanita Kristus Menurut Perspektif John Calvin," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 4, No. 1 (2024): 1-23, <https://journal.sttia.ac.id/skenoo/article/view/83>.

di Jenewa sebagai seorang reformator dan pengajar tentang Kitab Suci, serta mulai bergabung masuk dalam setiap organisasi Gereja Jenewa. Atas dasar ini Calvin dipilih secara langsung oleh pemerintah Jenewa pada tahun 1536 untuk menjadi pemimpin Gereja.²⁹

Tahun 1537, kepada Dewan Kota, Calvin memberikan karya artikel-artikel sebagai landasan dasar dalam organisasi gereja yang baru. Kemudian Calvin dan Farel dengan paham mereka, sebagai pengakuan akan iman mereka masing-masing. Konsep dan permintaan mereka tidak diterima oleh penduduk Jenewa.³⁰ Pada tahun 1538 banyak orang yang tidak menerima konsep pengakuan tersebut mulai memenuhi dan menguasai Dewan Kota sehingga Calvin dan Farel dengan tegas tidak diberi ruang dan kesempatan untuk berkhotbah di gereja Jenewa. Mereka diusir dari tempat mereka tinggal.³¹

Calvin kemudian diundang oleh Bucer dan Capito kembali ke Strasbourg guna kembali menjadi pendeta dan pengajar teologi di Prancis. Pada tahun 1539-1541 Calvin menjadi seorang pendeta Strasbourg serta mulai membangun kerja sama Bucer demi mewujudkan setiap rencana yang sudah dibuat sebelumnya namun gagal.³² Kembalinya ke Strasbourg juga merupakan langkah baik karena ia dipercaya untuk memperbaiki kembali tata gerejawi yang rusak pada tahun 1530. Ia diberi kebebasan oleh penguasa-penguasa untuk menyelesaikan semuanya. Ide Calvin dianggap baik mengenai disiplin gereja yang harus berfokus pada *consistory*, yang di dalamnya terdiri dari pemimpin-pemimpin gereja seperti pendeta dan dua belas pegawai pilihan mereka.³³

Melewati perjalanan hidup yang panjang dengan berbagai dinamika yang ada, Calvin menikah dengan seorang janda bangsawan bernama Idelette de Bure. Usia pernikahan mereka 19 tahun, namun tidak memiliki keturunan.³⁴ Calvin wafat 27 Mei 1564 karena penyakit yang ia derita sejak tahun 1558. Tugas yang belum sempat ia selesaikan di lanjutkan oleh Theodorus Beza. Kematian Calvin meninggalkan sejarah yang panjang sebagai pendiri gereja Calvinis yang tersebar di seluruh pelosok dunia.³⁵

²⁹Novallick Elungan and Roy Dekky Tamaweol, "Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja Dan Politik Serta Relevansinya Bagi Jemaat," *Jurnal Teologi Educatio Cristi* 5, no. 1 (2024): 97-109, <https://ejournal.teologi-ukit.ac.id/index.php/educatio-christi/article/view/123>.

³⁰Elungan and Tamaweol. 99

³¹Elungan and Tamaweol. 100

³²Elungan and Tamaweol. 100-11

³³Aliaster E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, ed. Staf Redaksi BPK Gunung Mulia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).

³⁴Hall, , *Calvin Di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil*. 66

³⁵Hall, , *Warisan John Calvin: Pengaruhnya Di Dunia Modern*. 76-81

E. Johannes Calvin mengenai Pemerintahan dan Pelayanan

Melihat kembali sejarah masa lalu dan secara khusus pada abad ke-19, ada seorang sejarawan yang bernama Haevard dan merupakan sosok yang sangat dihormati dan George Bancroft merupakan salah satu sosok yang mengakui bahwa Calvin memiliki banyak pengaruh pada setiap bidang dan salah satunya adalah pemerintahan sipil. Dari pengaruh ini kemudian ia sampai pada titik pencapaian kebebasan untuk Eropa dan Amerika.³⁶ Bancroft secara terang-terangan menyatakan bahwa Calvin adalah sosok yang sangat memiliki peran utama dalam mengangkat kultur Jenewa dan menjadi salah satu benteng paling kokoh atas semua kemerdekaan rakyatnya dan menjadi satu-satunya tempat yang paling subur untuk demokrasi. Artinya, bahwa kemerdekaan dari setiap institut-institut di Amerika semua berakar dari Calvinisme yang melalui puritanisme.³⁷

Berbicara pemikiran Calvin tentang pemerintahan dan pelayanan, tidak terlepas dari pengaruh St. Agustinus dari Hippo (354-430). Pengaruh pemikiran Agustinus mencapai banyak aspek dan salah satunya adalah diskusi mengenai masalah-masalah negara, diskusi mengenai masalah bisa dilihat dalam karya yang berjudul *The City of God* (Kota Allah). Ini adalah salah satu karya yang terbilang cukup berpengaruh dalam menggambarkan masalah ketegangan mengenai antitesis ketidakpercayaan dan kepercayaan (masalah pengaruh politik) pada sejarah perjalanan panjang manusia.³⁸

Dalam bukunya berjudul *Civitas Dei*, Agustinus menekankan pada keutamaan kasih yang mendalam tentang Allah. Ia lebih banyak berbicara mengenai penghargaan kepada sesuatu yang kekal dibanding sesuatu yang hanya bersifat sementara. Ia lebih menekankan pada etika dan keadilan terhadap sesama manusia. Upaya Agustinus adalah menggambarkan taksonomi dalam sebuah unit politik. Ini dilakukan karena masyarakat dengan paradigma mereka yang ada dan mau menggambarkan diri mereka melalui unit-unit peradaban seperti kota-kota yang lebih duluan ada. Atas dasar ini kemudian Agustinus melihat bahwa kebobrokan manusia dalam membatasi diri mereka pada kebaikan, membutuhkan pemerintah yang baik agar dapat mengendalikan mereka pada hal yang baik.³⁹

Agustinus tidak berharap banyak pada pemikiran non-Kristen (sekuler) agar menciptakan pemerintahan sipil yang baik serta dapat mewujudkan kebebasan. Agustinus menyadari bahwa yang namanya orang berdosa sama sekali tidak menyukai kesejajaran manusia yang ada di bawah Allah dan ia meng-alah-kan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, buku *City of God* merupakan bagian dari isi dan suara pem-

³⁶David W. Hall, *Penghargaan Kepada John Calvin: Perayaan Ulang Tahunnya Yang Ke-500*, ed. Irwan Tjulianto (Surabaya: Momentum, 2012).

³⁷Hall, 189-190

³⁸Hall, , *Calvin Di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil*. 4

³⁹Hall, 4-5

belaan iman (apologi) untuk nilai-nilai etika dan gereja. Upaya ini pun sebagai cara dalam menjawab setiap kritikus sekuler yang selalu menjadi kambing hitam runtuhnya Kekaisaran Romawi tentang kepercayaan serta praktik-praktik Kristen, seperti kejatuhan pada masa pemerintahan Homorarius yang merupakan salah seorang kaisar Kristen. Agustinus berupaya menunjukkan bahwa sebab utama kehancuran masyarakat adalah moral kekafiran yang sudah ada lebih dahulu sebelum Roma menjadi Kristen.⁴⁰

Calvin, dalam pemikirannya, membagi politik dalam dua bagian pemerintahan, yakni: *pertama*, lebih menekan pada konsep spiritualitas yang berfokus pada kehidupan rohani. *Kedua*, lebih berfokus pada kehidupan yang bersifat lahiriah. Namun Calvin tidak menganggap bahwa kedua bagian pemerintahan ini saling bertentangan. Sebaliknya, Calvin menganggap keduanya memiliki perbedaan cara namun tetap ada dalam naungan kedaulatan Allah.⁴¹ Tambahan lagi mengenai politik, ia menegaskan bahwa politik perlu hadir dengan cita-cita tujuan melayani guna tercipta kehidupan pada manusia yang baik, serta bagian dari memuliakan Allah. Jika dicermati, secara langsung Calvin memiliki semangat dan dorongan yang tinggi kepada kuasa politik yang bersifat teologis. Ia sadar bahwa antara gereja dan politik memiliki peran utama untuk saling menopang karena jika masyarakat hidup tanpa dibawa naungan pemerintahan negara tentu semua menjadi hancur atau kacau.⁴²

Khotbah Calvin yang diambil dari 1 Samuel 8, secara tegas menyatakan bahwa dalam dunia pemerintahan seharusnya tidak dilakukan segala sesuatu secara brutal sesuai kemauan sendiri, melainkan perlu adanya batasan sehingga tidak terjadi kekacauan yang sama seperti Samuel dan bangsa Yahudi. Ini adalah gambaran mengenai politik yang ada dalam Kitab Suci. Hal yang sama seperti tahun 1561 yang terjadi di sana terkait ketegangan bahaya-bahaya monarki yang kemudian diharuskan adanya pembatasan pada pemerintah dalam menjalankan tugas kekuasaan. Atas dasar ini, Calvin dengan idenya yang cermat berupaya menyeimbangkan kegunaan kebebasan dari setiap individu serta pemerintahan guna berjalan sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan.⁴³ Dalam khotbahnya dari 1 Samuel 8, ia menyorot umat Israel pada waktu menjelang pemilihan seorang raja. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengubah pikiran mereka, karena raja yang akan mereka pilih adalah orang yang akan merebut anak-anak mereka demi kepentingan pribadi yang kemudian adanya perampokan dan kekacauan besar. Oleh sebab itu, seharusnya raja dan pemerintah perlu menjalankan tugas mereka sesuai dengan yang Allah berikan dan tetapkan. Mereka seharusnya bekerja dengan jujur dan adil sehingga rakyat pun

⁴⁰Hall, 5

⁴¹Yornan Masinambow, "Mereformasi Praksis Politik Pejabat Gereja Berdasarkan Teologi Calvin," *Reformed Remnant Internasional, Minahasa* 1, no. 1 (2023): 42–48, <https://ojs.stakrri.ac.id/index.php/prosidingirc/article/view/44>.

⁴²Masinambow. 45

⁴³Hall, , *Warisan John Calvin: Pengaruhnya Di Dunia Modern*. 15

dapat hidup jujur, adil. Di atas mimbar St. Pierre, Calvin menyatakan bahwa rakyat ada di bawah naungan otoritas raja-raja dan pemerintah, namun pada saat yang sama keduanya perlu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁴

Calvin menafsirkan kata 'diakonios' dalam Roma 13:1-7 bahwa pemerintah merupakan wakil Allah yang diutus untuk melayani di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai warga negara perlu menghargai mereka sebagai utusan pelayanan Allah bagi dunia dan mereka. Dalam (1 Petrus 2:13-14). Dalam isi khotbahnya itu, ia menunjukkan bahwa warga negara harus setia kepada pemerintah sebagai wakil Allah, dan itu sama seperti warga menunjukkan kesetiaan kepada Allah.⁴⁵

Bagi David Hall, dalam tulisannya sebagaimana dikutip oleh Hadi P. Sahardjo, menulis tentang Calvin yang menyuarakan kepada orang Kristen mengenai kewajiban mereka, yakni: *pertama*, orang Kristen perlu menghormati pemerintah yang merupakan wakil Allah yang diutus untuk memimpin mereka. *Kedua*, sebagai bukti menghargai pemerintah maka orang Kristen perlu membayar pajak serta menaati semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, orang Kristen tidak perlu mencampuri urusan pemerintah secara brutal.⁴⁶ Dalam hal membayar pajak, Calvin memberi catatan khusus tentang hal membayar pajak orang Kristen bahwa meskipun pajak merupakan suatu kewajiban untuk publik secara umum namun perlu ada batasannya agar tidak menjadi beban bagi rakyat serta masuk dalam pemerasan tiranis. Hal ini dinyatakan Calvin karena pada saat itu Calvin sendiri menyaksikan dan merasakan bagaimana pembebanan pajak berlebihan kepada rakyat yang kemudian membuat pemerintah banyak melakukan korupsi sehingga kehidupan rakyat tersiksa dan miskin.⁴⁷

Bagi Calvin, manfaat pemerintah sipil ada tidak jauh berbeda atau kurang lebih sama seperti manfaat roti, air, udara dan matahari. Manfaat dan martabat dari suatu pemerintah jauh lebih dari semua ini. Artinya, kehadiran dan manfaat dari pemerintah bukan hanya untuk memberi makan, minum, nafas, terang dan kehangatan, melainkan lebih dari itu, untuk membawa damai dan ketentraman lain, seperti tidak adanya masalah antar agama, perang, dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang kemudian merugikan publik dan masyarakat secara umum.

⁴⁴LiHall, Hall, . 15-16

⁴⁵Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusran Politik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1-15, <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/16>.

⁴⁶Hadi P. Sahardjo, "Orang Kristen Dan Kehidupan Politik: Tiap-Tiap Orang Harus Takluk Kepada Pemerintahan Yang Di Atasnya; Sebab Tidak Ada Pemerintah, Yang Tidak Berasal Dari Allah; Dan Pemerintah-Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh AllaHall, " (Roma 13:1)," *Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 3, no. 2 (2014): 217-27, <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/96>.

⁴⁷Sahardjo. 222

Jika dalam dunia pemerintahan tidak ada masalah seperti ini maka masyarakat akan hidup dengan aman dan damai.⁴⁸

F. Mungkinkah Nilai-nilai Politik Teologis di Nusa Tenggara Timur (NTT)?

Provinsi NTT merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang masuk dalam masalah '3-T': Terluar, Tertinggal, dan Terdepan. Masalah 3-T disebabkan oleh banyak faktor, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.⁴⁹ Masalah ini dari tahun ke tahun masih terus menjadi perbincangan bagi negara Indonesia dan juga NTT sendiri. Banyak orang yang dengan kesadaran dan cinta NTT menyuarakan agar NTT bisa diperhatikan agar bangkit dari persoalan ini. Bisa dilihat dari berbagai macam "teriakan" yang tersebar di media sosial dan tulisan-tulisan. Namun sayangnya masalah di NTT itu sepertinya tidak pernah dapat diselesaikan. Suara "teriakan" tentang masalah ini sudah didengar dan direspons oleh kalangan tertentu yang mengupayakan adanya perubahan, pengembangan, dan penyelesaian. Namun ironi bahwa keadaan itu justru kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan (pemerintah) untuk memperkaya diri sendiri dibanding daripada menyelesaikan persoalan lewat kegiatan pembangunan yang ada.

Berangkat dari sekelumit persoalan di NTT di atas dan melihat kembali pandangan Calvin mengenai pemerintahan dan pelayanan sebagai perspektif untuk membangun kesadaran teologis politis, Penulis menguraikannya sebagai berikut. Pandangan Calvin mengenai politik kekuasaan dan pemerintahan jelas bahwa ia membaginya dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, pemerintah atau penguasa-penguasa yang titik fokusnya pada masalah lahiriah. *Kedua*, pendeta-pendeta yang titik fokusnya pada pemberitaan firman Tuhan (spiritual). Bagi Calvin, keduanya memiliki kedudukan tugas yang sama akan tetapi cara dan tempat pelayanan mereka yang menjadi pembeda bagi mereka. Antara pemerintah dan pendeta-pendeta, semuanya merupakan perantaraan dari Allah untuk menjalankan misi Allah demi kesejahteraan hidup setiap manusia yang ada di bumi ini.⁵⁰ Persoalannya yang terkait masalah korupsi, menggambarkan bahwa pemerintah yang ada di NTT tidak secara penuh memaknai tugas yang ada dalam diri mereka itu sebagai 'perantara' dari Allah untuk menjalankan misi-Nya untuk memberi damai serta kesejahteraan pada manusia.

Pemerintah di NTT sebenarnya menyadari bahwa banyak teriakan, kajian tulisan yang sudah banyak berbicara tentang masalah di NTT, seperti perdagangan orang, bunuh diri, *stunting* atau gizi buruk, dll. Semua itu diakibatkan oleh kurangnya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, seharusnya pembangunan

⁴⁸Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, ed. Staf Redaksi BPK Gunung Mulia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).

⁴⁹Agus Heruanto Hadna Anta Ibnul Falah, "Problematisasi Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Dan Terdepan)," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2022): 164–85, <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/2997>.

⁵⁰McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*.282

sekolah, rumah sakit, terminal dan dermaga, perlu diprioritaskan. Pembangunan-pembangunan itu ibarat “operasi jantung” demi melancarkan denyut kehidupan NTT sehingga tidak berdampak komplikasi dan merambat pada bagian-bagian lainnya dalam kehidupan masyarakat. Bagi Calvin, pemerintah dengan sistem politiknya itu sama halnya seperti embrio dari perkembangan Kerajaan Allah itu sendiri demi membawa kesejahteraan dan jaminan masa depan yang baik bagi dunia (lahiriah). Tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus ia jalankan, dibahasakan Calvin sebagai *externum medium salutis* (sarana keselamatan Allah yang lahiriah).⁵¹ Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah tidak melakukan korupsi sehingga kata Calvin tentang *externum medium salutis* dapat terjawab bagi masyarakat NTT.

Mery Kolimon menyatakan bahwa kekuasaan politis seharusnya berjalan sesuai konsep Alkitabiah yang merupakan bagian dari panggilan suci, dan terhormat bagi Tuhan kemudian diimplementasikan dalam hidup manusia.⁵² Negara Indonesia yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dideklarasikan sebuah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi masyarakat secara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, pemerintah dengan tugasnya diharuskan untuk menciptakan terobosan guna mewujudkan cita-cita tersebut. Cita-cita Indonesia bisa dilihat dalam UUD 1945, Pasal 34, yang menyebutkan tiga poin penting, yakni: *pertama*, negara bertanggung jawab dalam memelihara fakir miskin, dan anak-anak yang terlantar. *Kedua*, pemberdayaan diberikan kepada seluruh masyarakat, baik itu yang lemah dan tidak mampu, hal ini dilakukan lewat pengembangan sistem sosial. *Ketiga*, negara siap memberikan fasilitas berupa kesehatan dan pelayanan layak secara umum bagi masyarakat.⁵³

Untuk menjawab tiga poin di atas, maka pemerintah Indonesia berupaya menjawab atau mewujudkannya lewat tindakan pembangunan. Dalam bahasa pembangunan disebut sebagai proses sosial (*social plan*). Jalan menuju perubahan ini kemudian diambil alih oleh birokrat sebagai penggerak menuju perubahan. Hal ini kemudian masuk dalam proses terencana, atas dasar ini kemudian kita sampai pada satu titik dimana kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah menjadi cita-cita dan rencana yang sudah dimasukkan dalam UUD 1945, dan bagian dari hal terencana. Namun demikian, yang terjadi kemudian adalah proses dan rencana ini dimanfaatkan oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang sudah di-

⁵¹Suarbudaya Rahadian and & Fially Fallderama, “Sikap Kritis Terhadap Kekuasaan Dalam Tradisi Calvinist: Subuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisan Gereja Terhadap Pemerintah Untuk Mewujudkan Regnum Christi,” *Sociates Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 220–43, <https://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/173>.

⁵²Mery Kolimon, “Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini,” *Jurnal Ledalero* 15, no. 2 (2016): 258–73, <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/44>.

⁵³Dwi Astuti, “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat,” *Jurnal.Ensiklopediaku* 3, no. 3 (2021): 193–105, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/746>.

rencanakan dan dilakukan lewat pembangunan; dikorupsi demi memperkaya diri sendiri sehingga cita-cita yang ada dalam UUD untuk masyarakat tidak tercapai seperti yang ada di NTT.⁵⁴

Pandangan Calvin mengenai pemerintahan sipil pada saat itu, ia menyatakan bahwa tugas pemerintah sipil adalah selama ia menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka hal yang perlu ia lakukan adalah membantu masyarakat menjaga kedudukan gereja, membina kesusilaan, kedamaian dan keadilan seperti yang ada dalam undang-undang negara.⁵⁵ Ini yang perlu disadari oleh pemerintah di Indonesia pada masa sekarang. Mereka seharusnya menaati UUD yang sudah mereka tetapkan guna dapat menciptakan keadilan dan kedamaian. Namun jika mereka masih mengesampingkan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan UUD maka masyarakat selamanya akan tetap hidup dalam keterpurukan dan kekacauan. Jadi, nilai-nilai politik teologis menjadi mungkin jika kesadaran di atas terbangun dalam diri para penguasa atau pemerintah.

G. Gerakan Politik *Grassroot* Yesus

Pemerintah sebagai wakil Allah, mengikuti tafsiran Calvin, adalah penting disadari oleh penguasa. Penguasa atau pemerintah dapat meneladani Yesus. Yesus memiliki pendirian politik yang unik dan kuat. Dia memulai memainkan politik-Nya dengan membuat satu gerakan rakyat yang disebut *grassroot* atau “politik akar rumput.” Yesus menjalankan misi tersebut secara terbuka dengan berjalan mengelilingi semua tempat dan memperkenalkan tentang apa yang menjadi tujuan-Nya. Mereka yang menemani-Nya adalah orang-orang yang penuh dengan kesederhanaan, miskin dan lemah.

Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa Ia bukan sosok yang anti pengusaha dan pejabat. Walaupun pengikut Yesus adalah orang miskin dan lemah, namun Yesus tidak pernah menoleransi kesalahan dan dosa mereka.⁵⁶ Poin utama dari tujuan Yesus adalah pelayanan tentang dan untuk kebaikan dan kebenaran. Harapan Yesus dari pencapaian sebuah tatanan politik adalah berlakunya nilai keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai seperti ini yang bagi Yesus tidak bisa diraih dengan menggunakan senjata yang bisa dikompomikan, melainkan yang diutamakan adalah prinsip kasih.⁵⁷ Dibutuhkan belas kasih, empati, dan solidaritas di dalam jiwa para pemimpin masyarakat.

Pemerintah perlu belajar dari Yesus agar dapat membangun karakter yang baik, yakni seperti yang dikatakan oleh Kambodji, bahwa pemerintah yang baik dan bisa membawa perubahan adalah pemerintah dengan jiwa dan karakter yang baik dalam beretika, idealis demi menciptakan perubahan pada kesejahteraan masyarakat.

⁵⁴Astuti. 194

⁵⁵Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*.313

⁵⁶Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari_i=ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

⁵⁷Timo. 397

Pemimpin yang idealis adalah pemimpin dengan jiwa tegas untuk mewujudkan perubahan keadaan pada pengembangan hidup masyarakat. Tanpa adanya pemimpin yang jujur, tegas dan etis, tentu akan sulit membawa perubahan dan pemberian kesejahteraan pada masyarakat.⁵⁸

Oleh sebab itu, penulis sampai pada titik kesimpulan bahwa pemerintah harus sadar bahwa ketika mereka melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi, mereka bukan saja menghambat saja cita-cita negara dan memiskinkan masyarakat, namun mereka menghambat misi Allah yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk membawa damai sejahtera bagi negara dan masyarakat. Pemerintah harus menjauhi kejahatan dan menjaga kemurniaan jiwa kepemimpinan sejati, yang teologis.

H. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang korupsi dengan melihat dari perspektif teologi politik Calvin yang secara sederhana ia melihatnya dari dua sudut pandang pemerintahan, yakni pemerintah dari perspektif gereja (spiritual) dan pemerintah secara lahiriah (negara). Bagi Calvin ia memandang bahwa kedua jenis pemerintahan ini sama-sama berasal dari Allah. Kedua jenis pemerintahan ini hadir dengan tujuan yang sama dan saling menopang satu sama lain dalam menjalankan misi Allah di Dunia. Secara sederhana Calvin politik Calvin merupakan bagian dari mengeskpresikan kemuliaan Allah. Hal ini berarti pandangan Calvin merupakan sebuah kacamata baru bagi pemerintah NTT. Oleh sebab itu, teologi politik Calvin perlu dimaknai oleh pejabat pemerintah gereja dan secara khusus pemerintah negara sehingga pada saat mereka memainkan peran politik mereka dalam negara dan masyarakat itu benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Calvin sehingga masyarakat benar-benar mendapat damai kesejahteraan dan ini juga merupakan bagian dari menjawab misi Allah bagi dunia tentang kedamaian dan kesejahteraan.

Referensi

- Achmad, Aang. "Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat." *OLD Website Of Jurnal Mlimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 431–645. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16179>.
- Alvina Eka Rahmawati, Insyira Yusdiawan Azhar. "Analisis Negotiated Order Theory Dalam Kasus Korupsi 271 Triliun Di PT. Timah TBK Indonesia." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 73–84. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/410>.
- Amalo, Palce. "Kejati NTT Tahan 3 Tersangka Korupsi Renovasi 14 Sekolah Di Alor." Accessed January 16, 2025.

⁵⁸Kambodji, *Korupsi Perspektif Teologi Etis*. 44-45

- <https://mediaindonesia.com/nusantara/686558/kejati-ntt-tahan-3-tersangka-korupsi-renovasi-14-sekolah-di-alor>.
- Anta Ibnul Falah, Agus Heruanto Hadna. "Problematika Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Dan Terdepan)." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2022): 164-85. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/2997>.
- Astuti, Dwi. "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat." *Jurnal. Ensiklopediaku* 3, no. 3 (2021): 193-105. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/746>.
- Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Edited by Staf Redaksi BPK Gunung Mulia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Detikbali, Nusra. "Korupsi Proyek RS Boking RP 16,5 Miliar: 5 Tersangka-Bupati TTS Di Periksa." 19 Januari 2025, Pukul 07:30 Wita, n.d. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6821995/korupsi-proyek-rs-boking-rp-16-5-miliar-5-tersangka-bupati-tts-diperiksa>.
- Donovan, Gordy. "Dugaan Korupsi Terminal Kembur Matim Jaksa Bilang Tidak Tutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunflores.Com Dengan Judul Dugaan Korupsi Terminal Kembur Matim Jaksa Bilang Tidak Tutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain, <https://fl.>" Accessed January 23, 2025. https://flores.tribunnews.com/2022/10/29/dugaan-korupsi-terminal-kembur-matim-jaksa-bilang-tidak-tutup-kemungkinan-ada-tersangka-lain#google_vignette.
- Elungan, Novallick, and Roy Dekky Tamaweol. "Pandangan Yohanes Calvin Tentang Hubungan Gereja Dan Politik Serta Relevansinya Bagi Jemaat." *Jurnal Teologi Educatio Cristi* 5, no. 1 (2024): 97-109. <https://ejournal.teologi-ukit.ac.id/index.php/educatio-christi/article/view/123>.
- Hall, David W. *Calvin Di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil*. Edited by Stevy Tilaar. Surabaya: Momentum, 2011.
- . *Penghargaan Kepada John Calvin: Perayaan Ulang Tahunnya Yang Ke=500*. Edited by Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2012.
- . *Warisan John Calvin: Pengaruhnya Di Dunia Modern*. Edited by Jessy Siswanto & Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2017.
- Herdin Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama, and Gery Erlangga. "Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, Dan Pencegahannya." *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 2, no. 1 (2022): 13-20. <https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/24985>.
- Hikmatius Syuraida. "Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Eera Orde Lama Hingga Hera Reformasi." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 1 (2015): 230-38.

- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12011>.
- INDOTIMOST.COM. "Diduga Kerugian Negara Mencapai 5,3 M, Ketua DPP GPM Mendesak KPK RI Segera Memeriksa Bupati Manggarai Timur." Accessed January 22, 2025. <https://indotimpost.com/diduga-kerugian-negara-mencapai-53-m-ketua-dpp-gpm-mendesak-kpk-ri-segera-memeriksa-bupati-manggarai-timur/>.
- Jonge, Cristian de. *Apa Itu Calvinisme?* Edited by Rika Uli Napitupulu. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Kambodji, Omnesimus. *Korupsi Perspektif Teologi Etis*. Yogyakarta: ANDI: Penerbit Buku dan Majalah Rohani, 2022.
- Kolimon, Mery. "Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Ledalero* 15, no. 2 (2016): 258–73. <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/44>.
- Lunardi, Jeconiah. "Metafora Gereja Sebagai Mempelai Wanita Kristus Menurut Perspektif John Calvin." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 1–23. <https://journal.sttia.ac.id/skenoo/article/view/83>.
- Masinambow, Yornan. "Mereformasi Praksis Politik Pejabat Gereja Berdasarkan Teologi Calvin." *Reformed Remnant Internasional, Minahasa* 1, no. 1 (2023): 42–48. <https://ojs.stakrri.ac.id/index.php/prosidingirc/article/view/44>.
- McGrath, Aliaster E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Edited by Staf Redaksi BPK Gunung Mulia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Nailuvar, Dilya Qory, Nafisa Azahra Grace Deborah Lubis, Raden Roro Naura Aisyah, and Putri Prasetyo. "Kedudukan Dan Peran KPK Dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Negara Untuk Kelapa Sawit Di Riau Oleh Grup Duta Palma." *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 137–145. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/291>.
- NEWS, KEJATINTT. "Pidsus Kejati NTT Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Rehabilitasi Sekolah Pasca Bencana Kabupaten Alor Tahun 2022." Accessed January 16, 2025. <https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id/kejatintt-news/pidsus-kejati-ntt-tetapkan-3-tersangka-kasus-korupsi-rehabilitasi-sekolah-pasca-bencana-kabupaten-alor-tahun-2022/>.
- Rahadian, Suarbudaya, and & Fially Fallderama. "Sikap Kritis Terhadap Kekuasaan Dalam Tradisi Calvinist: Subuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisan Gereja Terhadap Pemerintah Untuk Mewujudkan Regnum Christi." *Sociates Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 220–43. <https://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/173>.
- Ratna Oktavina Rizky, Reza Abdilah Saputra, Maftukhatul Faziani, dan Mashudi. "Pencegahan Korupsi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Oligarki Dana Pensiun PT. Asabri (Persero)." *Jurnal Governance And Politics* 4, no. 2 (2024): 60–68. <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/jgp/article/view/426>.
- Sahardjo, Hadi P. "Orang Kristen Dan Kehidupan Politik: Tiap-Tiap Orang Harus

- Takluk Kepada Pemerintahan Yang Di Atasnya; Sebab Tidak Ada Pemerintah, Yang Tidak Berasal Dari Allah; Dan Pemerintah-Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah.” (Roma 13:1).” *Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 3, no. 2 (2014): 217–27. <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/96>.
- Sanusi, H.M. Arsyad. “Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume 6 Nomor 2, Juli 2009.pdf#page=91.
- Setyawan, Iwan. “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kultura* 16, no. 1 (2015): 5210–5366. <https://umnaw.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/SEPTEMBER-2015.pdf#page=4>.
- Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1–15. <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/16>.
- Sirai, Riza. “Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial H(PIS)* 3, no. 1 (2024): 279–91. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33242.
- Suwitri, Sri. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi.” *DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2007): 23–41. http://eprints.undip.ac.id/4370/1/Artikel_Witri.pdf.
- Timo, Ebenhaizer I. Nuban. *Meng-Hari_i=ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Wendel, Francois. *Calvin: Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya*. Edited by Irwan Tjulianto. Surabaya: Penerbit Momentum, 2015.